



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN JANUARI 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN JANUARI 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Januari 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Januari Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Februari 2019

Kepala BPSI



Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN FEBRUARI 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN FEBRUARI 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Februari 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Februari Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Maret 2019



Kepala BPPSI  
*Fathullah*  
Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN MARET 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN MARET 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Maret 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Maret Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.



Pekanbaru, April 2019

Kepala BBPSI



Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN APRIL 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN APRIL 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan April 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan April Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Mei 2019

Kepala BPPSI

  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN MEI 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN MEI 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Mei 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Mei Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2019

Kepala BPPSI

  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN JUNI 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN JUNI 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Juni 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Juni Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Juli 2019  
Kepala BPPSI  
  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN JULI 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN JULI 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Juli 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Juli Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Agustus 2019

  
Kepala BPPSI  
  
Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN AGUSTUS 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN AGUSTUS 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Agustus 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Agustus Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, September 2019

  
Kepala BPPSI  
  
Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN SEPTEMBER 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan September 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan September Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Oktober 2019

Kepala BPPSI

  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN OKTOBER 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN OKTOBER 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Oktober 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Oktober Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, November 2019



Kepala BPPI  
*Fathullah*  
Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN NOVEMBER 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN NOVEMBER 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan November 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan November Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Desember 2019

Kepala BBPSI  
  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PERIODE BULAN DESEMBER 2019**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU  
BULAN DESEMBER 2019**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Desember 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Desember Tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Januari 2020

Kepala BPSI  
  
Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.